

PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS
(STUDI TENTANG PANDANGAN BKM DI KELURAHAN SEI AGUL
KECAMATAN MEDAN BARAT)

SKRIPSI

RACHMAD AL FAJAR LUBIS
NIM. 23.14.3.014



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2018

**PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS
(STUDI TENTANG PANDANGAN BKM DI KELURAHAN SEI AGUL
KECAMATAN MEDAN BARAT)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sumatera Utara

OLEH:

RACHMAD AL FAJAR LUBIS

Nim: 23.14.3.014



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAD AL FAJAR LUBIS
Nim : 23.14.3.014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah
Judul Skripsi : PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN
POLITIK PRAKTIS (STUDI TENTANG PANDANGAN
BKM DI KELURAHAN SEI AGUL KECAMATAN MEDAN
BARAT)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 Oktober 2018

Rachmad Al Fajar Lubis

NIM. 23.14.3.014

PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS
(STUDI TENTANG PANDANGAN BKM DI KELURAHAN SEI AGUL
KECAMATAN MEDAN BARAT)

Oleh:

RACHMAD AL FAJAR LUBIS

NIM: 23.14.3.014

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

NIP. 19840706 200912 1 006

Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum

NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS (STUDI TENTANG PANDANGAN BKM DI KELURAHAN SEI AGUL KECAMATAN MEDAN BARAT). Letak permasalahan di dalam kajian ini adalah pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis, peneliti fokus pada pandangan BKM dalam hal kepentingan politik praktis pada pemanfaatan masjid. perbedaan pandangan antara BKM tentang politik praktis di masjid, ada yang memperbolehkan kegiatan politik tersebut dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti berfokus pada, pendayagunaan masjid dalam kegiatan politik pada masa Rasulullah SAW, bagaimana pandangan BKM tentang politik praktis yang dilakukan di masjid masjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik primer maupun sekunder dan wawancara kepada BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa: Masjid pada umumnya diartikan tempat umat muslim melaksanakan ibadah. Padahal sesungguhnya fungsi masjid juga memiliki fungsi sosial lainnya. Rasulullah membangun Masjid Nabawi untuk mempersatukan umat, sebagai tempat bermusyawarah, menyusun strategi perang dan taktik politik lainnya. Namun kini fungsi masjid hanya sebagai tempat melakukan ibadah madhah dan kegiatan pendidikan. Untuk kegiatan politik masjid semakin tertutup seolah ada pembatas antara kegiatan keagamaan dan politik. Padahal jika kita lihat zaman Rasulullah SAW politik dan agama berjalan beriringan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS (STUDI TENTANG PANDANGAN BKM DI KELURAHAN SEI AGUL KECAMATAN MEDAN BARAT)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah H. Fadlan Zuchri Lubis SE dan mama Hj. Harisah Nasution yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, ikhlas merepet karena sayang, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ayahanda Alm. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis yang mana telah membantu penulis dalam mencari judul skripsi secara sempurna. Semoga Allah senantiasa memberikan tempat sebaik-baiknya dan mengangkat derajatnya.

6. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Ayahanda Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku sekretaris Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
8. Ayahanda Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Putri Eka Ramadhani BB, M. Hum selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
9. Kakak tersayang Raficha Suri lubis, Adik tersayang Reihan Suhaila Lubis dan Ismi Humaira Lubis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga tersayang Fachruddin lubis dan H. Muhammad Thahir Nasution yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ulama dan Tuan Guru yang telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik seluruh mahasiswa Siyasah-A angkatan tahun 2014, BERKAH (Berbagi Sedekah), Akses Ponpes Al-Mukhlisin, PTQ Abdurrahman Bin Auf, dan Social Care Movement yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 04 Oktober 2018

Penulis,

Rachmad Al Fajar Lubis

NIM. 23. 14.3.014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Tinjauan Pustaka	20
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM	27
A. Penegrtian Masjid	27
B. Fungsi Dan Peran Masjid.....	27
C. Perkembangan Pendayagunaan Masjid untuk Kepentingan Politik Era Islam Klasik	30
D. Perkembangan Pendayagunaan Masjid untuk Kepentingan Politik Era Islam Modern	40

E. Peranan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis di	
Indonesia	46
F. Analisis Tentang Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan	
Politik Praktis Dalam Sejarah Peradaban Islam.....	55
BAB III FENOMENA PEMANFAATAN MASJID UNTUK	
KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS DI KELURAHAN SEI AGUL KECAMATAN	
MEDAN BARAT	57
A. Fenomena Pemanfaatan Masjid Di Kelurahan Sei Agul.....	57
B. Data Kependudukan Pemeluk Agama Serta Rumah Ibadah	
Di Kecamatan Medan Barat	62
C. Analisis Tentang Fenomena Pemanfaatan Masjid Untuk	
Kepentingan Politik Praktis Di Kelurahan Sei Agul	
Kecamatan Medan Barat	68
BAB IV RESPONS DAN ALASAN BKM DI KELURAHAN SEI	
AGUL KECAMATAN MEDAN BARAT DALAM MENYIKAPI	
PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN	
POLITIK PRAKTIS	71
A. Respons dan Alasan BKM	72
B. Hasil Wawancara.....	73
C. Analisis Tentang Respons dan Alasan Dalam Menyikapi	
Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis.....	86

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	94
RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap Muslim memiliki salah satu tugas untuk memakmurkan masjid.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. سورة التوبة: (١٨)

Arti Q.S At-Taubah ayat ke 18, Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.¹

Masjid tidak dapat di pandang sekedar sebagai suatu bangunan semata, melainkan padanya ada jamaah, pengelola, dan nisbahnya dengan syiar Islam. Masjid berasal dari bahasa Arab berarti *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi

¹Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, Juz 10, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 189.

kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini; terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk di jadikan tempat shalat.²

Rasulullah bersabda

الارض كلها مسجد (رواه مسلم)

“Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid).” (HR. Muslim)

Peradaban pada masa Rasulullah atau kebudayaan yang paling dahsyat pada masa Rasulullah adalah perubahan sosial. Diantaranya pembangunan masjid Nabawi, kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara mereka, berjual beli maupun perayaan-perayaan. Tempat ini menjadi faktor yang mempersatukan mereka.³

² Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 1.

³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung : Pustaka Setia. 2008), hlm. 63.

Di masa Nabi SAW, ataupun di masa sesudahnya masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahanpun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dan di pecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga merupakan ajang *halaqah* atau diskus, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum pertumbuhan remaja masjid dewasa ini juga termasuk upaya memaksimalkan fungsi kebudayaan yang di masjid.⁴

Adapun fungsi Masjid yang di buat Rasulullah tidak hanya untuk shalat saja. Di sana juga menjadi pusat aktifitas kaum muslimin dalam menggelar taklim dan pengajaran Islam, serta bimbingan-bimbingan lainnya. Ia merupakan balai pertemuan dan sebagai tempat pemersatu di antara unsur-unsur kabilah yang berbeda. Masjid menjadi tempat untuk mengatur segala urusan, sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan⁵

⁴ Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, hlm. 2.

⁵Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad*, (Surakarta: Shahih, 2012), hlm. 300-301.

Ditinjau dengan lebih kritis, peranan masjid mulai tergeser dari kedudukan semula, yakni masjid sebagai tiang utama agama Islam, sebagai sarana utama untuk mengaplikasikan risalah agama, dan masjid sebagai institusi yang paling berkomponen dalam menentukan tegak dan semaraknya agama Islam.⁶ Seperti yang dikemukakan bahwa fungsi masjid salah satunya ialah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.

Jadi masjid bukan sekedar tempat peribadatan rutinitas yang terbatas sebagai perwujudan pendekatan diri (*ubudiyah*) seorang hamba dalam ibadah mahdah, tetapi di sisi mualamalah, masjid juga sebagai pusat terbentuk dan terciptanya peradaban Islam dan merupakan sentral pengembangan sebagai aktivitas dalam kehidupan serta kaum muslimin.⁷

Pasca kemerdekaan, masjid masih dimanfaatkan sebagai tempat ibadah shalat, belajar membaca al-Quran bagi anak-anak dan tempat untuk menyelenggarakan peringatan hari besar Islam. Selain itu masjid juga dimanfaatkan untuk pembinaan generasi muda Islam dan diskusi keagamaan

⁶*Ibid*, hlm. 14.

⁷ Husni Fahimah Ilyas, "Menyoal Peran dan Fungsi Masjid Pemerintahan : Studi Atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Makasar", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 17, 2 (2015): 262.

umat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya pengaruh sekularisasi dan pandangan hidup materialisme, pada saat sekarang peran masjid dalam kehidupan umat Islam makin menyempit, dan bahkan terpinggirkan. Derasnya gelombang sekularisasi yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran pandangan umat Islam terhadap agama yang dianut, di antaranya dengan menjadikan agama dan lembaga-lembaga agama sekedar pelengkap hidup. Masalah ini sesungguhnya tidak hanya dialami umat Islam, umat non muslim seperti Nashrani juga mengalami masalah yang sama.⁸

Adapun yang di maksud dengan politik praktis adalah suatu kegiatan, aktifitas atau gerakan dari satu orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi pandangan, pendapat (opini) masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah, atau bahkan dapat merubah keputusan pemerintah. Adapun tujuannya untuk memperoleh kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan tersebut dengan memilih materi-materi serta kepala negara. Kelompok penekan ini sebaliknya, tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan secara langsung atau dalam melancarkan kekuasaan sementara tidak terlibat di dalamnya; mereka melancarkan tekanan-

⁸ Syasul Kurniawan , “Masjid Dalam Lintas Sejarah Umat Islam “, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 4, 2, (2004): 117.

tekanan atas kekuasaan yang sedang berjalan. Kelompok penekan ini berusaha mempengaruhi orang-orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang-orang mereka sendiri dalam posisi yang memegang kekuasaan, setidaknya secara resmi meletakkan orang-orang mereka. Tetapi, kelompok-kelompok penekan tertentu sebenarnya mempunyai wakil-wakil mereka di pemerintahan dan badan-badan legislatif, tetapi hubungan antara para individu-individu tersebut dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia atau sangat hati-hati.⁹

Menurut H. Muhammad Jamil, Politik di masjid itu boleh dilakukan di dalamnya guna untuk mempersatukan umat Islam, agar umat Islam akan berpolitik itu dengan baik tidak hanya memandang keburukannya saja. Maka siapa lagi yang akan memperbaiki politik ini dengan baik kecuali dengan kita umat Islam yang dimulai dari masjid ke masjid, karena Nabi berpolitik juga di masjid.¹⁰

⁹Afan Gaffar, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, (Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984) hlm. 119.

¹⁰ Muhammad Jamil, Ketua MUI, Ruang Dekan Paska UINSU, Wawancara Pribadi 07 April 2018, Pukul 14:25 – 14: 50 WIB.

Kebebasan politik menurut cara pandang dan pengertian Islam, memiliki ciri, macam dan bentuk yang cukup jelas, sesungguhnya kebebasan berpikir merupakan salah satu rukun dalam dakwah menuju agama para nabi dan rasul, bahkan ia menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya amal perbuatan manusia yang mendapatkan balasan maupun siksaan.

Partisipasi publik dalam aturan Islam dengan melaksanakan kebebasan berfikir, berekspeksi, bermusyawarah, mengangkat seorang pemimpin dan berpartisipasi dalam membela bangsa dan negara serta meningkatkan kalimat Allah merupakan salah satu asas dari beberapa asas yang di jaga oleh Islam.¹¹

Tolak Ukur dan Batasan Kebebasan Berpendapat

Adapun Tolak ukurnya adalah

1. Islam memerintahkan untuk selalu beretika dalam berdebat dan mengungkapkan pendapat serta menghargai pendapat orang lain tanpa harus berburu-buru memberi keputusan hukum
2. Islam melarang perdebatan yang dapat mendatangkan permusuhan dan kebencian. Allah SWT berfirman, “Serulah (manusia) kepada jalan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2005), hlm. 109-111.

tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.” (Al-Nahl: 125) “Dan jangan kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. “ (Al-Ankabut: 46)

Adapun Batasan Kebebasan Berpendapat adalah

1. Kebebasan pendapat tidak boleh mengakibatkan fitnah dan perpecahan umat Islam
2. Kebebasan berpendapat ini tidak boleh berakibat menyebarkan pembangkangan, hawa nafsu dan bid'ah di antara umat Islam
3. Kebebasan berpendapat ini tidak boleh mendatangkan penghinaan atau kata-kata kotor atau membicarakan rahasia orang lain. Allah SWT berfirman, “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang di ucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang di aniaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (An-Nisa': 148.)

Ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengkombinasikan antara kebebasan dan batasan. Kebebasan berpendapat dalam Islam tidak akan tegak kecuali atas dasar wawasan keilmuan dan pikiran yang menyentuh benak penanya.¹²

¹²*Ibid*, hlm. 119.

Bercakap-cakap di dalam masjid itu juga di perbolehkan selama percakapan itu berada dalam jalur yang halal dan baik. Hadits riwayat Muslim dan Jabin Ibn Sumarah bahwa Nabi Saw tersenyum bahkan tertawa mendengar sekelompok orang yang bercakap di masjid tentang pengalamannya pada masa jahiliyah¹³

Berbeda halnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bagian keempat, Larangan dalam kampanye Pasal 280 ayat (1) huruf (h) yang berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.”¹⁴

Pada era modernisme perpolitikan di Indonesia ini, banyak yang menyalah gunakan fungsinya pada tempatnya. Menurut Ramlan Surbakti, Politik adalah merupakan kegiatan yang di arahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.¹⁵

Menurut Dahlan Nasution Politik terdiri dari kegiatan organisasi dalam hal mana manusia berusaha memaksimalkan keyakinan mereka tentang nilai-nilai

¹³ Makmur Syafe'i, Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam ,” *Jurnal Usuluddin*, 27, 5, (2008): 109.

¹⁴Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta : Bhuana Ilmu, 2018), hlm.185.

¹⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo), hlm. 2.

sosial. Melalui tindakan politis, manusia berusaha untuk menyadari perbedaan pendapat mereka mengenai apa yang baik bagi masyarakat. Jadi, politik sebenarnya adalah suatu proses atau suatu cara untuk mencapai sasaran nilai, yang tidak ada artinya kecuali apabila di tinjau dari pengetahuan nilai yang menimbulkan tindakan politis . Definisi mengenai politik serupa ini adalah luas dalam penggunaannya terhadap tindakan-tindakan politis itu mencakup seluruh jenis kegiatan manusia. Karena gagasan-gagasan bersama mengenai hal baik itu yang membuat tindakan politis tadi unik, maka setiap tindakan manusia, dengan motivasi nilai dan kaitan organisasi dapat disebut sebagai politis. Tanpa dorongan nilai dan kaitan organisasi, maka tindakan yang sama adalah a-politis¹⁶

Dalam Al-Qur'an dijelaskan larangan berpolitik di masjid. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (١٠٨)

¹⁶Dahlan Nasution, *Politik internasional: Konsep dan Teori*, (Jakarta : Erlangga, 1991), hlm.

Arti Q.S At-Taubah ayat ke 107, Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, “kami hanya menghendaki kebaikan. “Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya).

Tafsir Ayat ini menegaskan bahwa Dan; di samping- kelompok-kelompok kaum munafik yang telah di sebut, ada juga di antara mereka orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan ke mudharatan pada orang-orang mukmin secara khusus dan masyarakat secara umum, dan untuk kekafiran dan pengingkaran kepada Allah swt, serta untuk memecah belah antara orang-orang mukmin yang telah mantap imannya lagi untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu sebelum mereka membangun masjid itu.¹⁷

¹⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keselesaan Al-Quran*, Juz 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 243-245.

Arti Q.S At-Taubah ayat ke 108, Janganlah engkau melaksanakan shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Tafsir ayat tersebut, Janganlah engkau berdiri apalagi shalat di dalamnya, yakni dalam masjid yang di bangun orang-orang munafik itu di untuk selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang di bangun atas dasar takwa, yakni ketulusan dan ketaatan kepada Allah, sejak hari pertama hingga selesai bangunannya terus menerus diliputi oleh ketakwaan adalah lebih patut, yakni patut kamu berdiri dan melaksanakan shalat serta aneka kegiatan bermanfaat di dalamnya.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 243-248.

Dan ada juga dijelaskan di dalam Al-Qura'an yang tidak melarang perpolitikan di dalam masjid)

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧). (سورة التوبة : ٦ - ٧)

Arti Q.S At-Taubah ayat ke 6, Dan jika ada diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Tafsirnya ayat tersebut ialah Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, berilah perlindungan kepadanya sehingga engkau memperdengarkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan memberi pemahaman kepadanya. Setelah itu, antarkanlah ia ke tempat yang aman karena orang-orang kafir tidak mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka dan yang mengandung kebaikan mereka. Mereka tidak mempunyai pemahaman yang bagus dan kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk yang bisa mendorong mereka memeluk agama islam. Perhatikanlah

kelembutan Allah swt. Yang maha pengasih hingga terhadap para penyembah berhala saat mereka meminta perlindungan keamanan.¹⁹

Arti dari Q.S At-Taubah ayat ke 7, Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepadamu , hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang bertakwa.

Dalam organisasi masjid, organisasi timbul karena manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya organisasi adalah, Kegiatan yang akan dilaksanakan, ada dua orang atau lebih, ada kerja sama, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu organisasi yang ada di masjid ialah Badan Kemakmuran Masjid (BKM)²⁰

¹⁹Aidh Al Qorni, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Juz 10(Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 103.

²⁰Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, hlm.31.

Penulis telah melakukan penelitian di beberapa masjid di Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul, di antaranya Masjid Jami', BKM Masjid Jami' mengatakan belum ada Politik Praktis di masjid tersebut, tetapi BKM masjid tersebut mempertegas bahwa tidak menerima kepentingan politik dalam masjid, dalam pandangan ketua BKM Masjid Jami' perpolitikan sekarang sudah berbeda dari zaman Rasulullah Saw dan partai politik tidak pantas masuk ke masjid, karena takut ada perpecahan umat Islam di karenakan partai politik.²¹ Sama halnya dengan Masjid Al-Muttaqin ketua BKM tidak menerima sama sekali Politik Praktis di Masjid tersebut tidak beda jauh dengan Masjid Jami' tersebut.²²

Berbeda halnya dengan Masjid Raudhatul Islam yang mana masjid tersebut pernah didatangi partai politik ke masjid tersebut, tetapi partai politik tersebut tidak membawa kepentingan politiknya, BKM masjid Raudhatul Islam mengatakan partai politik yang datang hanya berdakwa tentang keislaman saja tapi tidak berbau politik.²³

²¹Thantawi Nasution, Ketua bkm, Rumah Thantawi, Wawancara Pribadi, 06 November 2017.

²²Imran Nasution, Ketua BKM, Masjid Al-Muttaqin , Wawancara Pribadi, 08 November 2017.

²³Muhammad Azhari, Sekretaris BKM, Masjid Raudhatul Islam, wawancara Pribadi, 09 November 2017.

Adapun beberapa masjid yang mendukung Politik Praktis tersebut, di antaranya Masjid Nurul Islam yang mana ketua BKM mendukung Politik Praktis. Akan tetapi konteks yang di sampaikan harus bersifat keagamaan asalkan bersifat Ukhuwah Islamiyah, apabila di luar konteks keagamaan pihak BKM tidak menerima sama sekali dan pihak BKM tidak melambangkan atas satu partai.²⁴

Di satu sisi Masjid Al-Ikhlas memiliki kesamaan pandangan terhadap Masjid Nurul Islam yakni perbedaannya masjid tersebut menerima Politik Praktis bersifat umum dan masyarakat ada yang menyambut dan tidak menyambut akan hadirnya Politik Praktis tersebut, karena berbagai unsur pendapat pemikiran masyarakat. Ketua BKM juga tidak mengatas namakan satu partai, di karena takut terhadap pemikiran masyarakat yang berfikir ini adalah masjid atas satu partai.

Di satu sisi lain juga Masjid Silaturrahmi memiliki kesamaan pandang terhadap Masjid Nurul Islam dan Masjid Al-Ikhlas yakni menerima Politik Praktis bersifat umum kecuali Masjid Nurul Islam saja yang hanya saja menerima politik yang bersifat umum saja. Ada halnya yang membedakannya dengan ketua

²⁴Suwanto, ketua BKM, Rumah Suwanto, Wawancara Pribadi, 12 November 2017.

BKM Masjid Al-Ikhlas, ketua BKM Masjid Silaturrahmi menerima kegiatan Politik Praktis yang bersifat umum akan tetapi di alokasikan di halaman masjid saja, akan tetapi ketua BKM Masjid Al-Ikhlas menerima kegiatan Politik Praktis bersifat umum di dalam masjid, di karenakan oknum yang hadir keseluruhan beragama Islam. Ketua BKM juga tidak mengatas namakan satu partai, di karena takut terhadap pemikiran masyarakat yang berfikir ini adalah masjid atas satu partai.²⁵

Berbagai pandangan BKM masjid di Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Agul ada beberapa BKM yang menerima dan tidak menerima pelaksanaan Politik Praktis di lokasi masjid tersebut. Sebagian pandangan BKM mengatakan masjid hanya untuk tempat beribadah saja, dan sebagian BKM mengatakan boleh melakukan kepentingan politik di masjid asalkan berkonteks Islami, apabila tidak berkonteks Islami hanya boleh di laksanakan di pekarangan masjid dan ada juga yang memperbolehkan di dalam masjid.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana pandangan BKM mengenai pemanfaatan masjid melalui penelitian skripsi, yang berjudul : **PEMANFAATAN MASJID UNTUK**

²⁵Mansur Nasution, Ketua BKM, Masjid Al-Ikhlas, Wawancara Pribadi, 11 November 2017.

KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS STUDI TENTANG PANDANGAN BKM KELURAHAN SEI AGUL KECAMATAN MEDAN BARAT.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penyusun tertarik dan mencoba mengangkat permasalahan “Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik” yang perlu dikaji yang di tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis dalam sejarah peradaban Islam?
2. Bagaimana fenomena pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat?
3. Bagaimana respons dan alasan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dalam menyikapi pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis dalam sejarah peradaban Islam.
2. Untuk mengetahui fenomena pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.
3. Untuk mengetahui respons dan alasan BKM dalam menyikapi pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambahkan khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta memperkaya literatur terkait ketentuan politik praktis dalam masjid.

2. Kegunaan akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E. Tinjau Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut masalah Pemanfaatan masjid Untuk Kepentingan Politik Studi Tentang Pandan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat.

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Dalam pandangan Moh. E. Ayub, di masa Rasulullah masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Di antaranya kegiatan di bidang pemerintahan yang mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran.²⁶

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Disamping itu, metode ini juga merupakan cara bertindak dalam kegiatan penelitian agar dapat terlaksana secara rasional, terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam studi kasus (study case), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasi. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai BKM di masjid-masjid Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul. Karena semenjak proposal ini di tulis belum diperoleh data-data BKM di Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul maka BKM-BKM

²⁶*Ibid*, hlm. 2

masjid di Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul akan ditelusuri dengan kategori; mereka yang setelah didekati adalah orang yang ditunjuk sebagai pengurus BKM oleh masjid.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoe Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.²⁷

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data skunder yaitu;

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung²⁸. Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan

²⁷Burhan Bungin, ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124

²⁸Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 88.

penelitian ini yaitu pengurus BKM di masjid-masjid dari Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul.

b. Data Skunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu alquran, hadis, buku, jurnal, dan tentang pemanfaatan masjid dalam politik praktis.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah

sertatujuan yang telah ditentukan²⁹. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semistructured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut³⁰.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisa seperti buku, jurnal, dan Undang-Undang.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 155.

³⁰*Ibid*, hlm. 227.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Penulisan proposal ini terdiri dari lima bab di mana di dalamnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang, disusun sistematika sedemikianrupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Kedua, rumusan masalah, merupakan, penegasan terhadap kandunga yang terdapat dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan, Tujuanya adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, keempat, kegunaan, kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian dengan objek kajian penelitian. Kelima, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II, dalam bab ini penyusun mengemukakan dan menerangkan secara umum mengenai pemanfaatan masjid dan politik dalam sejarah peradaban Islam . Pembahasan ini dimulai dari pengertian, manfaat dan fungsi masjid, perpolitikan dalam masjid dalam sejarah peradaban Islam . Hal ini

dilakukan untuk memberikan pandangan awal sebelum melangkah lebih jauh pada masalah penelitian ini.

Bab III, dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana fenomena pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis. Yang di tinjau dari beberapa masjid yang berada di Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul.

Bab IV, dalam bab ini membahas tentang respons dan alasan BKM dalam menyikapi kemanfaatan masjid untuk kepentingan politik, Yang di tinjau dari beberapa masjid yang berada di Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul.

Bab V, dalam bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang Pandangan BKM mengenai pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik.

BAB II

PEMANFAATAN MASJID UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

A. PENGERTIAN MASJID

Masjid berarti tempat beribadah. Masjid berasal dari kata saja yang artinya tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjamaah. Pengertian ini juga mengerucut menjadi, masjid yang di gunakan shalat Jum'at di sebut Masjid Jami'. Karena shalat Jum'at di ikuti oleh rang banyak maka masjid Jami' biasanya besar. Sedangkan masjid yang hanya di gunakan untuk shalat lima waktu, bisa di perkampungan, perkotaan dan biasanya tidak terlalu besar sesuai dengan keperluan, di sebut Musholl, artinya tempat shalat.

B. FUNGSI DAN PERANAN MASJID

Masjid pada masa Rasulullah SAW bukan hanya sekedar tempat penyaluran emosi religius semata bahkan masjid menjadi suatu pusat aktivitas umat anantara lain:

1. Tempat latihan perang. Rasulullah SAW pernah menizinkan Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habasyah berlatih menggunakan tombak mereka di masjid pada hari raya
2. Balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Sa'ad bin Mu'az terluka ketika ketika perang Khandaq maka Rasulullah mendirikan kemah di masjid
3. Tempat tinggal sahabat yang dirawat
4. Tempat menerima tamu ketika utusan kaum Tsafiq datang kepada Rasulullah SAW beliau menyuruh sahabat untuk membuat kemah sebagai tempat penjamuan mereka
5. Tempat penahanan tawanan perang dari seseorang Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya di putuskan
6. Tempat pembinaan dan pengembangan kader pemimpin umat
7. Tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya
8. Tempat ajang perpolitikan
9. Pemilihan kepala negara
10. Tempat pembinaan di bidang sosial, kemanusiaan dan lain-lain³¹

³¹ Sofyan Syarfi Harahap, *Manajemen Masjid Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), hal. 4-5.

Masjid merupakan sekolah untuk mencetak kader-kader ulama, ahli fiqih, dan pendidikan, sebagaimana tokoh-tokoh yang Rasulullah SAW tugaskan menjadi pemimpin masyarakat, pemuka generasi, dan pendidik yang mumpuni dalam ilmu agama. Pada abad-abad pertama Islam, jumlah para ulama dan penyair sangatlah banyak. Ada para ahli fikih dari kalangan sahabat yang berguru langsung kepada Rasulullah SAW, ada pula para penyair yang membela Islam dan menyerang para musuh dengan gubahan-gubahan syair mereka.

Di Masjid Nabawi Madinah, banyak ulama dan ahli fikih seperti Imam Malik bin Anas dan ahli fikih lainnya menimba ilmu. Dari Masjid Kuah dan Baghdad, muncul Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Di Masjid Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal menimba ilmu; begitu pula para perawi hadits seperti Ishaq bin Rahawaih, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, juga para pakar bahasa dan Nahwu seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Sibawaih, dan Al-kasa'i; adapun yang menjadi sastrawan adalah Al-Jahizh, mereka semua menimba ilmu dan mengajar di masjid.

C. Perkembangan Pendayagunaan Masjid untuk Kepentingan Politik Era Islam Klasik

Ketua persatuan Ulama Dunia Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, masjid pada masa Rasulullah SAW adalah pusat kegiatan kaum muslimin. Masjid tidak hanya di gunakan sebagai tempat ibadah mahdhah seperti shalat, tetapi juga di gunakan sebagai pusat pengetahuan, peradaban dan gedung parlemen untuk bermusyawarah.³² Kegiatan politik kenegaraan semuanya tersentra di satu titik yakni masjid. Dalam perkembangan selanjutnya lahir berbagai departemen dan lembaga negara guna mengurus urusan politik kenegaraan yang dalam beberapa waktu juga masih di laksanakan di masjid di antaranya;

1. Administrasi pemerintahan

Sistem administrasi pada masa awal pemerintahan Islam dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah bersifat sentral, tidak mengikuti sistem yang menganut pembagian tugas pada beberapa kementerian masing-masing kementerian membawahi tugas-tugas tertentu seperti yang di lakukan oleh pemerintahan Abbasi sesudahnya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia tetap

³²Amri Amrullah, *Masjid dan Politik*, Koran Republika Online edisi 06 Maret 2015, di akses pada tanggal 07 September 2018 Pukul 11:45 WIB.

mendudukan para pejabat (pembantu/gubernur) Rasulullah seperti sebelumnya sesuai jabatan masing-masing. Sistem administrasi pemerintahan Islam tidak mengalami perubahan yang berarti. Perbedaan hanya terjadi dalam kata-kata Romawi yang di gunakan untuk orang-orang yang menjabat posisi sebelum penaklukan Islam.

2. Diwan (Departemen)

Nabi SAW dan Abu Bakar tidak pernah memberi upah yang pasti jumlahnya atas kesedian para sahabat untuk berperang namun ketika penakluk Islam berjaya, maka Umar memandang harta ghanimah harus di bagikan kepada kaum muslimin sesuai dengan posisi masing-masing. Maka salah seorang bangsa Persia menunjukkan cara membaginya yaitu dengan sistem membentuk diwan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Persia dalam mencatat pendapatan dan belanja negara, maka Umar pun menyusun beberapa diwan dan menentukan jumlah pemberian.

Umar telah mengangkat para juru tulis diwan-diwan dengan tugas sebagai penyusun tingkatan-tingkatan di mana Al-Abbas paman Nabi sebagai orang yang tercatat dalam urutan pertama. Kemudian Bani Hasyim selama masa pemerintahan Utsman dengan mengalami perubahan atas orang-orang yang berhak untuk di sebutkan di catat.

Umar juga telah mendirikan diwan tentara guna mencatat nama-nama tentara dan orang-orang khusus dari kalangan mereka untuk mendaat bagian. Kemudian ia pun menyusun diwan semasa pemerintahan Bani umayah hanya terbatas pada empat diwan atau dinas saja yakni diwan pajak, diwan persuratan diwan mustaghillat atau diwan berbagai penerimaan, dan diwan stempel sebagai diwan egara terbesar.

Sayyid Air Ali berkata sistem administrasi dan poitik negara Islam pada masa pemerintahan Bani Umayah bukan merupakan karya Muawiyah melainkan karya Abdullah Balik bin Marwan. Dialah yang telah menggganti identitas Administrasi dan keuangan Persia dan Romawi menjadi beridentitas Arab. Kepiawiannya dalam bidang politik di lihat dari langkahnya mencetak mata uang serta mengistruksikan agar seluruh mata uang selama ini beredar di seluruh kedaulatan Bani Umayah di tarik serta menghukum orang yang memalsukan mata uang dengan hukuman yang berat.

3. Keamiran (pemerintahan daerah)

Kepemimpinan Rasulullah bukan semata-mata bersifat keagamaan melainkan sebagai kepemimpinan yang bersifat politik kenegaraan juga. Beliau adalah seorang panglima perang tentara dan hakim yang mengadili berbagai perselisihan yang terjadi di samping sebagai pemungut pajak.

Ketika wilayah pemerintahan Islam pada masa Umar bertambah luas maka untuk memudahkan jalannya pemerintahan dan untuk memudahkan pengawasan sumber-sumber pemasukan kekayaan negara Umar membaginya menjadi wilayah Administrasi. Umar telah mengangkat beberapa gubernur atas wilayah-wilayah ini yang berkuasa atas nama khalifah sebagai badan eksekutif dan kehakiman para penguasa wilayah ini disebut amil (gubernur) yang bermakna bahwa pejabatnya tidak berkuasa secara mutlak. Pada masa-masa selanjutnya jabatan ini berubah menjadi wali yang berubah fungsi dari fungsi amil sehingga pejabat mempunyai kekuasaan yang lebih. Kemudian jabatan tersebut berubah lagi menjadi amir yang beridikasi bahwa perubahan nama jabatan itu menunjukkan pemerintahan yang di jalankan oleh para gubernur bersifat otoriter dan diktator. Selanjutnya keamiran para amil atas wilayahnya pada masa awalnya bersifat umum, tetapi kemudian berubah menjadi bersifat khusus. Tercatat bahwa kedudukan Amr bin Al- Ash sebagai gubernur Mesir pada mulanya bersifat umum.

4. Kepolisian

Polisi adalah pasukan yang di tugaskan oleh khalifah atau gubernur untuk memelihara keamanan, menjaga peraturan, menangkap orang-orang terpidana dan berbuat kerusakan, di samping mengawal atau mengawasi

pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan keselamatan dan ketenangan masyarakat. Para petugas yang di serahi pekerjaan ini disebut polisi, karena mereka telah mengenakan tanda-tanda khusus sehingga dengan tanda-tanda itu mereka menjadi terkenal. Umar adalah orang pertama yang menerapkan sistem jaga malam. Pada masa Ali bin Abu Thalib kepolisian di susun dan nama pemimpin di sebut Shabbib Asy Syurthah (kepala polisi). Seorang kepala polisi di pilih dari kalangan atau suatau kaum dan dari orang-orang berfisik kuat. Seorang kepala polisi menyerupai seorang gubernur dewasa ini, karena ia berkedudukan sebagai kepala tentara yang bertugas membantu gubernur untuk menjaga keamanan.

Pada mulanya kepolisian menginduk kepengadilan yang bertugas sebagai pelaksana dan menerapkan hukum yang telah di tetapkan dalam pengadilan, sehingga oleh karenanya kepala polisi berfungsi sebagai penegak hukum dan pelaksana hukuman atas terpidana. Ketika bangsa Arab berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 20 H kepolisian berkedudukan di kota Al-Fusthah dan ketika Shalih bin Ali Al Abbasi mendirikan kota militer pada tahun 132 H, maka di sana di dirikan markas kepolisian yang di beri nama Dar Asy

Syurthah Al Ulya, lalu markas kepolisian yang berkedudukan di kota Al-Futhah di beri nama Dar Asy Syurthah As Suflas.³³

Berbagai peristiwa keagamaan yang di alami di Jauzirah Arab dan negeri-negeri Islam sangat berpengaruh menonjolkan peranan masjid di bidang politik dan militer. Sejak terjadinya peristiwa terbesar di Jazirah Arab, yaitu munculnya agama Islam di tangan Nabi Muhammad SAW, masjid memiliki andil yang nyata dan istimewa dalam setiap peristiwa. Beliau menjadikan Madinah sebagai tempay hijrah sekaligus ibukota Daulah Islam, lalu membangun Masjid Nabawi. Masjid itu bak batu pertama pembangunan kehidupan umat islam, baik di bidang agama, sosialm, politik, maupun militer.

Di masjid ini beliau menerima kedatangan delegasi dari negara-negara tetangga serta suku-suku Arab. Di masjid ini pula beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat terkait urusan-urusan mereka di masjid ini beliau megatur strategi perang begitu waktu keberangkatan pasukan. Pun, di masjid ini terdapat suatu tempat untuk memasang bendera dan menyerang panji perang kepada panglima. Ketika kaum muslimin menahan tawanan

³³Hasan Ibrahim Hasan , *Sajarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 304-329.

perang, para tawanandi bawa ke masjid dan di ikat pada tiang-tiang atas perintah Rasulullah SAW.

Setelah Makkah di taklukkan (Fathu Makkah) dan kaum muslimin menundukkan orang-orang Quraisy berikut sekutunya, melihat Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah untuk berpidato. Orang-orang berkumpul di sana. Beliau bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah semata; tiada sekutu baginya. Dia pasti menepati janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan musuh sendirian (dan seterusnya)". Kemudian beliau bertanya, "Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian, apa yang aku perbuat terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Perlakukan sebaik-baiknya, wahai saudara kami yang demawan." Beliau pun bersabda, "Pergilah karena kalian bebas.

Sewaktu penduduk Makkah mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, sebagian besar di antara mereka murta. Menyaksikan itu, Suhail Bin Amr, wali kota Makkah saat itu, berdiri di pintu Ka'bah dan berpidato dengan suara lantang. Setelah memuji Allah dan mengabarkan wafatnya Rasulullah SAW, dia berkata, "Sungguh, kejadian ini hanya akan memperkuat Islam. Barang siapa meragukan kami, niscaya kami jatuhkan hukuman mati." Ia juga menambahkan, "Wahai penduduk Makkah, janganlah jadi orang terakhir yang masuk Islam

sekaligus orang pertama yang murtad. Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan agama ini sebagaimana di sabdakan Rasulullah SAW. Sungguh, saya pernah melihat beliau berdiri di tempatku ini seraya bersabda, “ucapkanlah bersamaku *la ilaha illallah*, niscaya bangsa Arab tunduk pada kalian dan niscaya bangsa “Ajam (non Arab) membayar Jizyah (uang keamanan) kepada kalian. Demi Allah, harta benda simpanan Kisradan Kaisar akan di belanjakan di jalan Allah. Barang siapa antara mengejek dan bertepuk tangan (ragu-ragu), demi Allah, hemdakhlah ia pastikan dirinya bertahan hidup (untuk membuktikannya). “mendengar pidato itu orang-orang pun urung murtad.

Setelah Rasulullah SAW wafat, kita saksikan para khalifah mengikuti jejak langkah beliau. Setelah sang khalifah di pilih, ia pergi ke masjid untuk berpidato di depan kaum muslimin. Dalam pidatonya, sang khalifah menyampaikan strategi politiknya berikut sistem pemerintahannya. Bahkan penerimaan janji setia juga dilakukan di masjid, yaitu baiat umum, setelah baiat khusus dilakukan terhadap orang-orang tertentu. Misalnya baiat khusus yang dilakukan Abu Bakar terhadap beberapa orang muslim di Tsaqifah Bani Sa'idah, lalu ia pergi ke masjid untuk melakukan baiat umum terhadap seluruh kaum muslimin.

Jadi baiat khusus di lakukan terhadap tokoh-tokoh *ahlul hall wal aqd* (dewan syura) saja, sedangkan baiat umum di lakukan terhadap seluruh rakyat, mirip referendum.

Dari atas mimbar Rasulullah SAW, Abu Bakar berpidato menjelaskan strategi politiknya kepada kaum muslimin;

“Wahai sekalian manusia, saya telah di angkat menjadi pemimpin kalian, padahal saya bukan yang terbaik di antara kalian. Maka, apabila saya berbuat sesuatu kebaikan, bantulah saya. Tetapi, apabila saya berbuat suatu keburukan, luruskanlah saya. Kejujurn adalah amanat, sedangkan kebohongan khianat.

Orang yang lemah di antara kalian adalah orang ynag kuat bagi saya agar haknya saya penuhi, Insya Allah, orang yang kuat di anantara kalian adalah orang yang lemah bagi bagi saya agar hak itu saya ambil darinya, Insya Allah”.

Demikianlah pidato Abu Bakar r.a di Masjid Rasulullah SAW. Pidato tersebut berisi sendi-sendi ke Islaman yang meliputi program politik keagamaan. Dalam perjalanan sejarah, pidato tersebut terus di kenang berulang-ulang sejak 14 abad silam, dan tetap mengundang kekaguman generasi sesudahnya.³⁴

Ali pernah menjawab pernyataan, ketika orang Khawarij menyatakan keluar dari kelompok Sayyidina Ali Radhiyallahu Anhu, di karenkan sebagian besar orang Khawarij menyatakna kembali kepada kelompok Ali dan ada juga sebagian membelot dari golongan Ali. Sabil naik ke atas mimbar, salah satu dari mereka yang bersikeras mengatakan, tidak ada satupun keputusan yang benar kecuali dari Allah SWT. Maka Ali menetapkan keputusan bahwa mereka tetap termasuk dari kelompok kau muslimin dengan tiga syarat; kami tidak akan mencegah kalian masuk masjid selagi tujuan kalian adalah untuk berdzikir kepada Allah, kami tidak akan mulai memerangi kalian dan kami tidak akan menghalangi jatah fai' bagi kalian, selama kalian masih mau bekerja sama dengan kami.³⁵

³⁴ Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 137-139.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hlm. 129-130.

D. Perkembangan Pendayagunaan Masjid untuk Kepentingan Politik Era Islam Modern

Periode singkat Pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah telah menorehkan sejarah dengan tinta emas, yang tidak mungkin terulang lagi dalam sejarah umat manusia. Seorang Nabi terakhir sekaligus pemimpin umat dan kepala negara. Periode berikutnya adalah kepemimpinan manusia biasa yang untuk beberapa waktu masih menunjukkan kepemimpinan yang nyaris sempurna untuk ukuran manusia yang bukan seorang nabi dan rasul. Suatu kepemimpinan yang terbimbing oleh wahyu dan etika yang berjalan lurus, sehingga di sebut *khilafah rasyidah*. Akan tetapi semua ini memudar ketika kepemimpinan pasca *khilafah rasyidah* berubah menjadi *al-mamlakah* (kerajaan) yang penuh dengan cela dan dosa.

Meskipun upaya menegakkan sistem kerajaan itu telah dimulai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, namun mayoritas ahli sejarah menganggap bahwa model kerajaan itu di mulai pada masa pemerintahan muawwiyah, dan selanjutnya di lanjutkan di nasti Abbas.³⁶

³⁶ Ridwan HR, *Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 211.

Politik adalah bagian penting dari ajaran Islam. Nabi di samping beliau adalah utusan Allah yang bertugas menyebarkan risalah Islam, beliau pun seorang politikus. Lihatlah bagaimana beliau melakukan kontak-kontak politik terhadap para raja di zamannya, bagaimana beliau menegakkan hukum-hukum Islam kepada narapidana yang di kenai hukum had, mengatur urusan rakyat dan sebagainya. Yang kesemuanya membuktikan bahwa Islam dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan

Argumentasi bagaimana eratnya hubungan Islam dan politik, di katakan oleh seorang pakar politik islam dari Mesir, Dr. Dhiahuddin Rais, beliau menulis: “Sistem yang di bangun Rasulullah dan kaum muslimin yang hidup bersama beliau di Madinah, jika di lihat dari segi praktis dan di ukur dengan variabel-variabel politik di era modren tidak di sangsikan lagi dapat di katakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par-Excelence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk di katakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika di lihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.

Sesungguhnya tidak perlu usaha keras untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Islam dan politik bagian yang tak terpisahkan. Catatan-catatan sejarah

dan nash-nash syariat berserakan di dalamnya kitab-kitab para ulama dan peneliti yang menunjukkan kesatuan di antara keduanya, namun demikian pendistorian oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit terus dilakukan dengan berbagai motif dan tujuan. Mereka menyatakan bahwa agama adalah satu hal, dan politik adalah hal yang lain. Sebut saja Abdurrahman Wahid pernah menyatakan: “Walau Islam menjadi agama terbesar di Indonesia, tetapi jangan jadikan Islam sebagai ajaran negara. Biarkan Islam berkembang sebagai milik pribadi pemeluknya, sehingga akan tercipta hidup yang rukun didalam masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan lain iya menyatakan , “Ajaran agama, apakah itu tasawuf, tarekat, atau hukum fikih atau apa saja tidak bisa di jadikan sebagai ajaran resmi negara. Kalau kita memaksa Islam sebagai ajaran negara, maka saudara-saudara kita seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, tidak mau berada di dalam suatu negara yang ajarannya Islam. Kalau kita menginginkan persatuan, maka Islam jangan dijadikan ajaran negara tetapi di jadikan milik masing-masing pribadi.

Pernyataan-pernyataan yang muncul dari seorang Gusdur menunjukkan bahwa ia menolak adanya formalisasi syariat oleh negara dan ia menolak adanya hubungan antar agama dengan politik. Sikap ini terbilang aneh, apalagi muncul dari seorang tokoh agama. Padahal hubungan antar negara dan politik tidak bisa diingkar keberadaannya.³⁷

Dalam perkembangannya, ketika Islam secara mundur teratur di tinggalkan dalam peranannya dalam kehidupan politik, keadaan kaum muslimin semakin lemah dan menyedihkan. Kondisi ini diperparah lagi dengan serbuan pemikiran di samping sebuah fisik dari orang-orang orientalis dan pemikiran-pemikiran barat. Salah satu peluru tajam pemikiran yang ditembakkan langsung mengarah jantung kaum muslimin itu bernama sekulerisme, yakni pemisahan agama dan kehidupan.

Kondisi ini merupakan puncak kemunduran yang memicu problem-problem yang semakin sulit untuk di atasi. An Nahbani berpendapat, “Dahulu, kaum muslimin mengetahui bahwa keberadaannya dalam hidup ini adalah hanya untuk Islam saja, menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negeri serta menyebarkan dakwah Islam keluar negeri, dan sesungguhnya metode

³⁷ A. Satori Ismail & Hafidz Abdurrahman, *Pemikiran Politik Dakwah Kontemporer*, (Yogyakarta: cv. Budi Utama, 2015), hlm. 145.

praktis untuk merealisasikan adalah dengan jihad yang dilakukan oleh negara. Meskipun demikian kenyataan sebenarnya menunjukkan bahwa umat Islam setelah mengetahui semua itu mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim di dunia ini adalah mencari kesenangan dunia terlebih dahulu, baru setelah itu menyampaikan nasihat dan petunjuk. Itupun jika keadaannya mengizinkan. Di sisi lain, negara sudah tidak memperdulikan lagi kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan hukum Islam. Negara tidak lagi merasa bersalah atas kelalaiannya dalam berpangku tangan dari aktivitas *jihad fi sabilillah* dalam rangka menyebarkan Islam. Kaum muslim sendiri, setelah kehilangan negaranya di samping kekurangan dan kelemahannya, mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat di raih kembali dengan cara membangun masjid-masjid, menerbitkan buku-buku, tulisan-tulisan atau karangan, serta mendidik akhlak.

Sementara itu, pada saat yang sama tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah mereka. Peran Islam yang mulai di singkirkan pada kehidupan politik negar pada akhirnya hanya menghancurkan tatanan kehidupan umat manusia, bahkan secara berangsur-

angsur tetapi dampaknya datang beruntun tak mengenal ampun. Itulah dampak buruk dari sekulerisme yang kita rasakan pada era ini³⁸

Kekhawatiran-kekhawatiran yang merupakan akibat dari ketidakpahaman terhadap syariat, atau paham tetapi memiliki target-target dan tujuan tertentu sungguh tidak beralasan. Di masa Nabi Muhammad saw dan para khalifah penerusnya selama lebih dari seribu tahun orang-orang non muslim, bisa hidup sejahtera di bawah naungan Islam, justru orang non muslim di profokasi untuk merasa tidak aman terhadap penerapan syariat? Rasulullah justru mengajarkan: “Barang siapa mengganggu seorang dzimmi (Non muslim yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah), sungguh ia telah mengganggu ku, dan barang siapa yang mengganguku , sungguh ia telah mengganggu Allah (HR. Tahbrani).

Kejayaan seluruh umat manusia sesungguhnya sangat bergantung kepada penerapan syariat islam khususnya dalam bidang politik, seperti hukum perundang-undangan, ekonomi, politik dalam dan luar negeri, jihad dan lain-

³⁸ *Ibid*, hlm. 133-134.

lain. Islam mustahil akan menjadi rahmat jika syariat di pisahkan dari pengaturan urusan rakyat.³⁹

E. Peranan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis di Indonesia

Lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan masyarakat adalah salah satu fungsi manajemen pemerintahan yang sangat penting untuk mencapai kemakmuran, terutama di negara Islam. Di zaman modern sistem ketatanegaraan khususnya di negara Islam semakin berkembang dari berbagai peradaban.

Administrasi pemerintahan pada masa modern tidak sama lagi dengan masa klasik. Jika dulu di masa klasik dikenal istilah diwan, sistem keamiran, al-barid dan lain sebagainya, kini di masa modern sistem yang diberlakukan tidak sama lagi, hal ini disebabkan wilayah Islam yang makin meluas dan terpisah-pisah menjadi beberapa negara dan menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem hukum dan pemerintahan di beberapa negara Islam juga mengalami berbagai perubahan. Sejumlah negara Islam saat ini ada yang secara jelas menyatakan Islam sebagai agama negara. Diantaranya juga ada negara

³⁹ *Ibid*, hlm.. 148.

yang pemerintahanya berbentuk monarki tetapi sebagian besar berpemerintah republik.⁴⁰

Sejarah kolonial bermula dengan kekuasaannya VOC yang hampir tidak memperhatikan permasalahan pendidikan, dan sedikit kesempatan pendidikan yang di berikan terbuka hanya bagi orang-orang Kristen Eropa maupun pribumi. Bukti pertama di perhatikannya pendidikan untuk orang-orang non musim terdapat dalam suatu instruksi Gubernur Jenderal Daenels pada 1808 menandai suatu perubahan resmi sikap. Namun, rencana yang di dasarkan pada undang-undang itu” tidak pernah terwujud, sejauh menyangkut pendidikan pribumi. Perubahan nyata baru terjadi pada zaman kebijaksanaan etis pada 1901. Inilah kebijakan kolonial yang bersumber terutama dari segi manusiawi, yang menyatakan bahwa belanda berutang budi pada Indonesia atas keuntungan-keuntungan masa lalu yang telah di peroleh dari Indonesia. Kebijaksanaan etis itu, pada hakikatnya merupakan, suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan mengarahkan kemajuan ekonomi, politik dan sosial,. Yang berkaitan dengan pembicaraan kita ialah perhatian besar yang di berikan kepada pendidikan gaya Barat, dan hal ini

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, Cet ke-5, 2011), hlm. 221.

menyebabkan semakin banyak orang Indonesia memasuki sekolah-sekolah umum. Namun, di bandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan penduduk Indonesia, jumlah itu masih kecil bahkan yang lebih kecil ialah jumlah pelajar dari kalangan muslim santri. Hal ini sebagian di sebabkan oleh sistem diskriminatif pendidikan, dan sebagian di sebabkan oleh politik non-koperatif para uama terhadap pemerintahan kolonial.

Dengan demikian, akibat puncak pendidikan kolonial ialah melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elite tradisional , priyayi, yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Indonesia berpendidikan Barat. “Interposisi elite tradisional dan Cina cenderung menyamarkan peranan Belanda sebagai pegisap tenaga pribumi. Inilah sebabnya, sejak permulaannya, gerakan nasionalis di Indonesia bercorak anti kolonial, anti cina, keislaman dan sosialis. Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan para penjajahan kafir, dan gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan kepentingan para santri sebagaimana yang terjadi pada SDI (Sarikat Dagang Islam), 1905, sebagai gerakan massa pertama yang besar dan di organisasi secara politik dengan mudah di tafsirkan sebagai nasionalisme yang kuat. Pertentangan antara nasionalisme ke Islaman dan keningratan tradisional di

tegaskan oleh penentangan kuat terhadap gerakan itu yang di lancarkan oleh para pejabat pemerintah dari kalangan orang-orang ningrat Indonesia. Kaum priyayi merasa gerakan nasionalis Islam menyerang privelese mereka, penentangan itu di lakukan untuk melestarikan diri

Perhatian yang kian besar dari pemerintah terhadap meningkatnya fundamentalisme Islam, dan tindakan intensif dari pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan ekspresi Islam yang secara radikal, mengkritik pemerintah, telah muncul pada tahun-tahun belakang ini. Isu-isu ini, idaklah terlalu dramatis untuk di katakan, kiranya bersifat sentral bagi kebangkitan politik Islam di Indonesia.⁴¹

Dakwah dalam upaya mewujudkan sebuah institusi politik Islam/Khilafah menjadi perkara yang sangat penting dan tidak boleh dilalaikan setiap individu muslim, mengingat perubahan hukum tersebut. Jika demikian, lalu di mana relevansi antara dakwah dengan poitik? Secara historis, dapat di buktikan bahwan dakwah Islam yang di dukung oleh kekuasaan politik sangatlah efektif dan menunjang perkembangan dakwah.

⁴¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan ke Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 64-66

Salah satu peninggalan yang nyata sampai sekarang yang membuktikan begitu kuatnya pengaruh kesultanan Islam terhadap dakwah Islam adalah Masjid Agung Demak yang tergolong masjid tertua di Indonesia, yang juga digunakan sebagai pusat pemerintahan. Masjid ini berdiri tahun 1446 M. Hal ini terlihat dari tulisan yang terukir di pintu bledeg masjid tersebut.

Kehadiran Masjid Demak tidak mungkin diabaikan begitu saja peranan dalam sejarah penyebaran dakwah Islam pada masa itu. Pentingnya kekuasaan politik bagi kelangsungan dakwah menyadarkan para Walisongo untuk terlibat dalam percaturan politik. Seperti Sunan Kudus sebagai panglima perang yang menggantikan Sunan Ngudung ketika menyerang Majapahit dan di bantu oleh para wali yang lain. Bahkan tatkala Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1479 M , sang sultan menjadi Salokantara dan Jugul muda kitab undang-undang kesultanan yang berisi tentang hukum-hukum syariat Islam. Namun, sikap toleransi di tunjukkan kesultanan Demak kepada masyarakat yang non muslim. Bahkan Sunan Gunung Jati memberikan gelar kepada Raden Patah dengan nam Sultan Ahmad Abdullah Arifin setelah terinspirasi oleh pengangkatan khalifah Sultan

Salim saat menaklukkan ke sultan Mesir. Sunan Gunung Jadi melakukan ini tepat pasca kepulangannya dari berhaji di Masjidil Haram.

Secara politik, kesultanan Demak di Pulau Jawa mampu mengikis kepercayaan Hindu-Budha yang melekat di masyarakat seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kondisi ini di akui oleh tokoh Budhis di Myanmar, tepatnya di Rohingnya. Atas dasar situasi politik kemasyarakatan yang pernah ada di Indonesia, mereka melakukan penindasan dan pembantaian terhadap kaum Muslimin di Rohingnya. Kata mereka jangan sampai terjadi Myanmar seperti di Indonesia, di mana dahulunya adalah berpenduduk Hindu-Budha namun dengan keberadaan kaum muslimin mereka menjadi terkikis dan berubah menjadi kelompok minoritas. Kaum Budhis di sana muncul karena ketakutan yang berlebihan, sebab pada faktanya umat Islam saat ini berbeda dengan kondisinya di masa kesultanan Islam terdahulu.

Saat ini kondisi umat Islam dalam kondisi lemah karena tidak menguasai sistem pemerintahan yang menjalankan hukum-hukum Islam sebagaimana dahulu. Pemerintahan yang menjadikan sistem Islam sebagai undang-undangan maka menjadikan politik luar negerinya dengan dakwah dan jihad. Walaupun demikian kesadaran menjalankan roda dakwah secara individu oleh sebagian

kaum muslimin tentu masih ada, tetapi tanpa dukungan dan manajemen dari negara yang menerapkan Islam, dakwah akan berjalan terseok-seok dengan peningkatan jumlah kaum muslimin yang rendah

Oleh sebab itu, sejak kekhilafahan mengalami kemunduran dan kemudian hancur tidak pernah lagi di jumpai adanya Islamisasi masi sampai pada level negara. Berbeda ketika slam di jadikan sebagai sumber hukum negara dalam naungan khilafah, fakta menunjukkan sebagai negara semisal Mesir, Libya, Andalusia, Indonesia, Irak, India dan lain-lain berhasil di Islamkan.

Dengan berbagai analisis dan fakta-fakta sejarah yang ada jelaslah bahwa dikotomi antara Islam dan politik hanya merugikan umat Islam sendiri. Terbukti ketika dakwah di dukung, di fasilitas, bahkan menjadi politik luar negeri sebuah negara, dakwah memiliki tingkat efektifitas yang tinggi dalam menyampaikan hidayah Islam ke pelosok dunia. Namun yang harus dicamkan dan di pahami aadalah bahwa ketika negara yang berideologi Islam menjadikan dakwah dan jihad sebagai politik luar negerinya bukan berarti bahwa negara akan memaksakan Islam ke setiap negeri yang di taklukkan. Kondisi demikina tidak di kenal dalam sejarah Islam. Sebab Islam sama sakali berbeda dengan konsep

imperialisme barat, yang cenderung menindas, menguras, dan berbuat dzalim kepada setiap negara yang menjadi jajahannya.⁴²

Menurut Ahmad dalam bukunya, *Ad Dakwah Islam*, beliau berpendapat bahwa para imam mujtahid dari generasi salaf, semoga Allah meridhai mereka, tidak melakukan pengkajian secara sempurna di seputar topik dakwah ini, tidak seperti yang mereka lakukan pada sejumlah topik lain, seperti: ibadah, muamalat, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Ketika membahas dakwah Islam, paling banter mereka menyinggung tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah yang bersifat individual. Hal ini lebih disebabkan karena tidak sedikitpun di dalam benak mereka terlintas bayangan negara khilafah Islam atau daulah Islamiah akan menemui kehancurannya, syarat akan tergusur, dan negeri-negeri Islam akan berubah dari negara Islam (*dar al Islam*) menjadi negara kufur. Walaupun semat terbenak mereka mengenai hal-ha semacam ini, mereka tetap tidak mampu memberikan solusi dan pemecahan terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, para mujtahid hanya diuntut untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi, bukan persoalan yang masih bersifat prediktif dan pengandaian semata.

⁴² A. Satori Ismail & Hafidz Abdurrahman, *Pemikiran Politik Dakwah Kontemporer*, hlm. 173-175.

Menyikapi realita bahwa ulama-ulama salaf belum melakukan kajian yang berkaitan dengan thariqah dakwah untuk membangkitkan umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di era kontemporer seperti sekarang ini muncullah berbagai organisasi masyarakat dan organisasi politik untuk menyikapi berbagai kemerosotan yang terjadi pada dunia Islam. Ada yang menitik beratkan pada pendirian masjid-masjid, majelis fatwa keagamaan, pendidikan, kegiatan sosial, kerohanian dan politik.

Sayangnya berdirinya berbagai ormas dari organisasi politik itu hingga saat ini belum saatupun membuahkan hasil. Artinya dakwah belum menciptakan suatu tatanan masyarakat yang Islami dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan ada kecenderungan umat Islam semakin menjauh dari Islam. Antara Islam dan umat Islam terjadi paradoks. Islam di satu sisi dan umat Islam yang lain.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 2-3.

F. Analisis Tentang Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis

Dalam Sejarah Peradaban Islam

Berdasarkan data-data yang dikutip dari buku-buku, pemikiran, jurnal, blog dan website guna untuk, memahami dari pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis dalam sejarah peradaban Islam sebagai berikut:

1. Memahami tentang perbedaan peran dan fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW dengan Islam era Modern, yang dimana peran dan fungsi masjid di masa Rasulullah SAW ini sangat berkaitan dengan sistem Kegiatan di bidang pemerintahanpun mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dan di pecahkan di lembaga masjid. Beda halnya dengan sekarang masjid hanya sebatas tempat beribadah dan hanya sebagian masjid saja yang memperbolehkan kegiatan yang pernah di lakukan Rasulullah SAW dan itu hanya kegitan politik, sosial, dan ekonomi.
2. Banyaknya sebuah pemikiran yang memisahkan antara agama dan politik guna untuk mencapai tujuan tertentu seperti halnya Catatan-catatan sejarah dan nash-nash syariat berserakan di dalamnya kitab-kitab para ulama dan peneliti yang menunjukkan kesatuan di antara

keduanya, namun demikian pendistorian oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit terus dilakukan dengan berbagai motif dan tujuan. Mereka menyatakan bahwa agama adalah satu hal, dan politik adalah hal yang lain. Sebut saja Abdurrahman Wahid pernah menyatakan: “Walau Islam menjadi agama terbesar di Indonesia, tetapi jangan jadikan Islam sebagai ajaran negara. Biarkan Islam berkembang sebagai milik pribadi pemeluknya, sehingga akan tercipta hidup yang rukun didalam masyarakat Indonesia. Padahal pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah membedakan itu semua karna apa yang di perlakukan semua ada kaitannya dengan agama. Karena agama adalah landasan utama bagi Rasulullah untuk mencapai tujuan prihal keduniaan.

3. Dakwah dan politik adalah suatu hal yang terpenting untuk di kaitkan, Secara historis, dapat di buktikan bahwan dakwah Islam yang di dukung oleh kekuasaan politik sangatlah efektif dan menunjang perkembangan dakwah. Dimana yang nyata sampai sekarang yang membuktikan begitu kuatnya pengaruh kesultanan Islam terhadap dakwah Islam adalah Masjid Agung Demak yang

tergolong masjid tertua di Indonesia, yang juga di gunakan sebagai pusat pemerintahan.

BAB III

Fenomena Pemanfaatan Masjid untuk Kepentingan Politik Praktis di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan barat

A. Fenomena Pemanfaatan Masjid Di Kelurahan Sei Agul

Indonesia mayoritas penduduk muslim sebanyak 88,7% berdasarkan data yang di himpun dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) pusat tercatat ada 700.000 masjid dan Mushallah yang tersebar di seluruh penjuru tanah air jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia atau setara dengan total jumlah seluruh masjid yang terbentang di kawan Maghribi di bagaian barat Afrika hingga Bangladesh di sebelah timurnya. Sehingga masjid itu buka hanya tempat pribadahan saja bahkan ada juga yang memanfaatkan untuk kepentingan politik.⁴⁴

Saat ini, banyak masyarakat yang berpandangan bahwa semua hal yang berkaitan dengan dunia politik itu negatif atau tidak baik. Politik kerap dikonotasikan sebagai penipuan, kebohongan, akal-akalan, permusuhan, atau hal-hal yang semuanya itu bisa berakibat buruk. Masyarakat menganggap

⁴⁴<http://www.dmi.or.id>. Diakses (23 April 2018).

bahwa semua orang yang masuk dalam dunia politik itu akan menjadi kotor, jauh dari kebaikan dan akan bertindak tidak sesuai dengan peri kemanusiaan.

Meskipun sebenarnya tidak semua tentang politik itu buruk, tetapi pemikiran mereka sudah terlanjur ‘Politik Kotor’ sehingga sulit untuk dirubah. Masyarakat akan selalu mengatakan bahwa semua hal yang berkaitan dengan politik itu harus di jauhi. Itulah yang mengakibatkan terjadinya penurunan dan ambruknya kepercayaan masyarakat mengenai politik.

Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat di hindari manusia, misalnya ketika Ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika Ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika Ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Ia menyimpulkan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang di rancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Secara tidak langsung, berarti Aristoteles memandang bahwa politik itu baik. Dengan adanya politik maka permasalahan sosial yang menyangkut tentang

massa akan bisa terpecahkan. Namun, pandangan itu nampaknya tak dilanggengkan oleh masyarakat pada masa sekarang.⁴⁵

Adapun fenomena yang peneliti temukan di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, adanya kehadiran oknum-oknum politik yang hadir baik itu dari non partai maupun *independent*. Berbagai macam agenda yang dilakukan oleh oknum politik yang mana tujuannya ke masjid-masjid untuk melakukan sebuah kegiatan baik itu tentang ke Islaman, ada juga yang memberikan bantuan pembangunan dan lain-lain. Untuk melancarkan kegiatan tersebut oknum politik yang melakukan kegiatan ataupun sebaliknya oknum politik yang sengaja di undang masyarakat, melakukan kerja sama dengan kalangan anak muda, komunitas muslim, BKM dan masyarakat setempat untuk mencapai suatu kegiatan yang berjalan lancar tentunya.

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan di masjid-masjid Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul, baik itu mengundang oknum politik tersebut, atau oknum politik tersebut melakukan kegiatan di masjid yang di tuju. seperti halnya melakukan kegiatan Subuh berjama'ah, tabligh akbar yang di isi sebagian

⁴⁵ <http://www.lpmpendapa.com>, edisi 20 April 2016, di akses pada, tanggal 12 September 2018, pukul 18:25 WIB.

pematerinya dari kalangan ustadz setempat, ustadz yang sengaja di undang, para alim ulama dan mengundang oknum politik yang aktif dalam penegakan politik dan perekonomian umat Islam dewasa ini.

Ada juga sebagian oknum politik yang rutinitasnya aktif mengisi pengajian ba'da Subuh dan Isya di masjid-masjid, yang mana oknum politik tersebut memang sengaja di undang masyarakat. Adapun kajian dalam pembahasan tersebut sama saja seperti pengajian biasanya. Pada masa marak-maraknya pemilihan umum adanya sebagian kelompok dari kalangan partai tersebut ada yang memberikan bantuan untuk perlengkapan, pembangunan masjid, dan bantuan untuk masyarakat setempat, dan juga yang di iming-imingin bantuan tapi tak kunjung sampai ke masjid tersebut.

Pada intinya sebuah fenomena yang di lakukan di masjid-masjid tersebut yang di hadiri oknum politik, semua untuk kebangkitan umat, untuk mensejahterakan rakyat yang bernuansa Islami, tanpa adanya perpecahan antara umat seakidah maupun berbeda akidah. Karena siapa lagi yang akan menegakkan politik yang baik ini, dimana harus memulai dari masjid ke masjid, untuk memahami arti dari politik jangan hanya berpandangan buruk saja, karena Nabi Muhammad SAW juga berpolitik dan di lakukan di dalam masjid.

Maka dari karena itu umat Islam harus betul-betul mempelajari politik dari sejarah Rasulullah SAW. Dimana halnya, Rasulullah SAW memanfaatkan masjid sebagai sentral di bidang pemerintahan mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dan di pecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam.

B. Data Kependudukan Pemeluk Agama Serta Rumah Ibadah Di Kecamatan Medan Barat

**DATA RUMAH IBADAH DAN PEMELUK AGAMA
DILINGKUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN BARAT
TAHUN 2018**

NO	KELURAHAN	JUMLAH RUMAH IBADADAH					JUMLAH PENDUDUK							
		MASJID	MUSHOLLA	GEREJA	PURA	WIHARA	MUSLIM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	LAIN2	JUMLAH
1	P.BRAYAN KOTA	3	7	4	-	4	7412	1971	341	193	804	3	1	10.725
2	GLUGUR KOTA	4	3	2	-	4	4885	999	173	121	4041	-	3	10.222
3	KESAWAN	6	5	2	-	2	1909	749	146	136	3217	-	-	6.157
4	SEI AGUL	11	3	7	-	8	16301	7.902	797	156	3327	-	-	28.483
5	K.BEROMBAK	8	7	2	-	1	23172	2.471	208	132	809	-	-	26.792
6	SILALAS	6	3	1	-	-	6245	802	174	37	2170	-	-	9.428
	JUMLAH	38	28	18		19	59.924	14.894	14.894	775	14.368	3	4	91.807

DATA MUSHOLLA
KANTOR KUA KECAMATAN MEDAN BARAT
TAHUN 2018

NO	MUSHOLLA			PENGURUS		KELURAHAN
	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	NAMA	ALAMAT	
1	AL-IKHLAS	JL. KLY. SUDARWOSO LK IX	3	MUAZ	LK. IX. 19 - B	GLUGUR KOTA
2	NURUL ISLAM	JL. KLY. SUDARWOSO LK IX		REZA PAHLEVI	KOMPLEK SOFINDO	
3	AL –ABROR	JL. KLY. SUDARWOSO LK		USMAN SYAM	GG. BADAN	
4	AL-IKHLAS	JL. PETTEMP.GG.SETIA	7	ZULHEMI	JL. PERTEMPURAN	P. BARAYAN KOTA
5	AL-RIDWAN	JL.PUTRI HIJAU		MA'AD	JL. PUTRI HIJAU	
6	AL-FALAH	JL. PUTRI HIJAU		M..ZAINUN AZHAR	JL. PUTRI HIJAU	
7	AL-HIDAYAH	JL. PUTRI HIJAU		JOKO SUYANTO	JL. PUTRI HIJAU	
8	AL-SANULARIFIN	JL. PUTRI HIJAU		ISMAIL ROKAN	JL. KLY SUDARSO	
9	AL-IKHAS	JL. KLY. SUDARSO LK XII		SAID ZULKIFLI	JL PUTRI HIJAU	
10	MUSTAFAWIYAH	JL. KANTOR CAMAT		FAHRUROJI	JL. GURILA	
11	AL-IKHLAS	JL. KARYA GG. WONOWOSO	7	ABD.LATIF	JL. KARYA	K. BEROMBAK
12	AL-HUDA	JL. KARYA LK . II		PANUSUNA NASUTION	GG. KARANG SARI	
13	TAQWA	JL. KARYA GG. LANGGAR		AGUS SUPRIADI	JL. KARYA	
14	AL-FALAH	JL. KARSA GG. BILAL		MHD. ALI SARJANI	JL. SEKATA	
15	AL-IKHLAS	JL. KARYA GG. RUKUN		ISMAIL RITONGA, S.AG	JL. KARYA	

16	AL-IKHSAN	JL. KARYA GG. SALAK		H. MULYANTO	JL. KARYA	
17	AL-FALAH	JL. KARYA DAME		MHD. SALEH NST	JL. KARYA	
18	ASR,RUMKIT	JL. PUTRI HIJAU		M.IQBAL	JL. ASR. RUMKIT	
19	ASR,KOBEK	ASR. BLOK KOBEL		MISBAH	ASR BLOK KOBEL	
20	AL-IKHLAS	KTR. LURAH KESAWAN	5	IKHWAN PULUNGAN	JL. PUTRI HIJAU	KESAWAWAN
21	RUMKIT II	JL. PUTRI HIJAU		RUJITO HAMID	ASR. RIUMKIT	
22	AL-HASANAH	JL. BALAI KOTA DHARMA		SYAFRUDDIN LUBIS	MEDAN	
23	AN-NADAUM	JL. SEI DELI		ASNI	JL. SEI DELI	
24	ULMATUL MUSLIMI	JL.SEMANGKA	3	ISMI NASUTION	JL. SEKATA	SILALAS
25	DJAMIATUL ARIYAH	JL. NANGKA		RAJALI UTUH	JL. NANGKA	
26	AL-MUTTAQIN	JL. KARYA RAKYAT		ZAINUDDIN NST	JL. KARYA RAKYAT	
27	KURNIA	JL. SEKATA	3	ABD HAMIDIN	JL. SEKATA	SEI AGUL
28	JAMIATUL MUKADDIMAH	JL. PANGYOYOMAN		M. SALEH NST	JL. PENGAYOMAN	

DATA MASJID
KANTOR KUA KECAMATAN MEDAN BARAT
TAHUN 2018

N O	MASJID			PENGURUS		KELURAHAN
	NAMA	ALAMAT	JUMLA H	NAMA	ALAMAT	
1	AT-TARTIB	JL. KLY . SUDARSO	4	HT. SYAHDAN	JL. IV. GG BAHADUR	GLUGUR KOTA
2	AL-MUFLIHUN	JL. KLY SUDARSO		ISMAIL	JL. XL/X	
3	NURUL IMAN	JL. KLY SUDARSO XI		IAMM SARJONO	KOMPLEK PLN LK. XI	
4	RABIATUL MUSLIMIN	JL. KLY SUDARSO LK III		H.MUHAYAT	LK XII	
5	AL-JIHAD	JL. MASJID AL JIHAD	3	ZULKIFLI	JL. PERTAHANAN	P. BRAYAN KOTA
6	JAMI'	JL. MERDEKA		NIZAMUDDIN	JL.MERDEKA LK XX	
7	SYUHADA	JL. BUDI PEMBANGUNAN		H.ASAD DAROEMIN	JL. BUDI PEMBANGUNAN	
8	TAQWA	JL. KARYA GG. PURWOSARI	8	DRS. AMIRUDDIN SIAHAAN	JLKARTA	K. BEROMBAK
9	NURUL ISLAM	JL. KARYA GG. CIREBON		DRS. ABD HAMID NST	JL. KARYA GG CIREBON	
10	AL-FURQAN	JL. SEKATA. LK XI		SYAFII	JL. SEKATA	
11	AL-KHAIRIYAH	JL. KARYA SETUJU		H.MUHAMMAD NST	JL. KARAY RAKYAT	
12	AS SYAFIYAH	JL. KARYA GG . SALAK		DRS. KASBULLAH	JL. KARYA GG. SALAK	
13	AL-WIRAJI	JL. KARYA. GG SOSRO		DARS. H. HASANUDDIN BB	JL. KARYA GG SOSRO	

14	MUSLIMIN	JL. KARYA GG KARTINI		SWAGIRUN	JL. KARYA	
15	AL-FAJAR	JL. KARYA CLINCING		SYAKIRUDDIN HSB	JL. KARYA CELINCING	
16	GG.BENGKOK	JL. MASJID AL JIHAD		DRS. H. M SAZLI NST	JL. MASJID	
17	AKAMAL	JL. PM. JINGGA		H. BACHTIAR EFENDI	JL. P. M JINGGA	
18	BAITUS SYIFA	JL. PUTRI HIJAU		SYAFRUDDIN	JL. JELAMBIR V	
19	AL-MUSSAWA	JL. ARAB	6	DRS. AZIZ HASAN,MM	JL. LAKSAN	KESAWAN
20	TAQWA SAMAD	JL. PUTRI HIJAU		IDHAM ABDULLAH	MEDAN	
21	AT-TAUBAH	JL. PUTRI HIJAU		HARYONO	JL. PURI HUJAU	
22	JAMIK	JL.. SEI DELI		KHAIRUL AMRI	JL. SEI DEELI	
23	MUHLISHIN	JL. DUKU		M.SYUKUR	JL. DUKU	
24	AR-RIDHO	JL. H ADAM MALAIK	6	DRS. H. MUCHTAR	JL. H. ADAM MALIK	SILALAS
25	H.AHMAD MUKTAR	JL. MAKMUR		DRS. H. FUAD HELMY	JL. MAKMUR	
26	H. MARASET	JL. SEI DELI		ANWAR EFENDI NST	JL. SEKATA	
27	RAUDHATUL ISLAM	JL. ADAM MALIK		ASMUI PARINDURI	JL. ADAM MALIK	
28	NURUL HIDAYAH	JL. D. SINGKARAK		AFRIZAL	JL. DANAU SINGKARAK GG. MASAJID	
29	AS-SYUHADA	JL. D. SINGKARAK		H. SYAWAL HRP	JL. DANAU SINGKARAK	
30	AL-MUTTAQIN	JL. KARYA 41		H. IMRAN	JL.MAKMUR	
31	TAQWA MUHAMMADIYAH	JL. KARYA GG. MADARASAH		M. ISA ANSHARI	JL. KARYA GG MADRASAH	
32	JAMI'	JL. KARYA	11	H. TANTOWI NST	JL. SUKADAMAI	SEI AGUL
33	SARIFATURRAHMAN	JL. SEKATA GG NUSA INDAH		KHOLID SPD,I	JL. SEKATA	
34	BAITURRAHMAN	JL. SEKATA GG . SEROJA		MUCHSIN	JL. SEKATA GG SEROJA	
35	AL IKHLAS	JL. KARAYA GG. WAKAF		DRS. H MANSYUR NST	JL. KARYA GG WAKAF	
36	RAUDHATUL ISLAM	JL. SEKATA		IR. M MISBAH	JL. SEKATA	

			PARINDURI	
37	SILATURRAHIM	JL. KARYA SETUJU	H. PARMOHONAN NST	JL. SEKATA
38	AL-HALIM	JL. SUKA DAMAI	MUHAMMAD SYARIF	JL. SUKA DAMAI

C. Analisis Tentang Fenomena Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat

Berdasarkan data-data yang di dapati selama penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat dan fenomena yang terjadi di masjid-masjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat sebagai berikut:

1. Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki penduduk mayoritas muslim dan non muslim baik itu Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan lain itu hanya sebagian saja.
2. Masjid-masjid di Kecamatan Medan Barat memiliki cukup banyak masjid sekitar 38 masjid aktif yang terletak di beberapa kelurahan. Adapun yang peneliti lakukan hanya di Kelurahan Sei Agul saja dan Masjid yang terletak di Kelurahan Sei Agul Ada 11 masjid yang berdiri, dan masyarakat ada sebagian yang mengatakan masjid di Kelurahan Sei Agul tidak sampai 11 masjid.
3. Musholla di Kecamatan Medan Barat memiliki cukup banyak musholla sekitar 28 musholla yang aktif yang teletak di beberapa kelurahan dan penulis tidak melakukan penelitian ke musholla-musholla.
4. Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat adanya kehadiran dari oknum-oknum politik kemasjid-masjid dengan tujuan yang tertentu. Ada pihak dari oknum politik tersebut melakukan kegiatan seperti halnya pengajian membahas

tentang politik dan non politik, membahas tentang politik praktis, memberikan bantuan dengan tujuan memakmurkan masjid, dan banyak pertentangan di kalangan masyarakat/jama'ah dan BKM mengenai kegiatan politik.

BAB IV

Respons dan Alasan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Dalam Menyikapi Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis

Imam Ghazali berkata: “kekuasaan sangat penting untuk tegaknya peraturan dunia dan agama. Dan peraturan agama sangat penting untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang secara pasti merupakan tujuan dari para nabi. Maka dari itu, kewajiban adanya imam (khalifah) termasuk perkara yang sangat penting dalam syara’ yang tidak ada jalan untuk meninggalkannya.

Imam Ibnu Taymiah pun berkata: “Apabila kekuasaan terpisah dari agama, atau apabila agama terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia akan rusak.

Muhammad Abduh berkata: “hikmah persyariatan hukum tidak akan sempurna kecuali bila ada suatu kekuatan untuk menegakkan hukum hudud dan menerapkan keputusan hukum secara benar. Dan pemeliharaan keteraturan masyarakat dan kekuatan itu tidak boleh ada di tangan banyak

A. Respons dan Alasan BKM

Berbagai macam alasan dan respons BKM tentang perpolitikan di masjid, ada sebagian pihak BKM memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan kegiatan politik itu berlangsung, di karena konteks yang di sampaikan tidak berbau Islami. Sebagian pihak BKM ada juga yang memperbolehkan kegiatan politik praktis tersebut berlangsung dan ada pula yang juga tidak memperbolehkan, yang mana alasan pihak BKM yang memperbolehkan politik praktis adalah pihak BKM dan masyarakat setempat sudah tahu dan mengenal oknum politik tersebut baik itu watak dan prilakunya dan ada juga yang beranggapan memperbolehkan politik praktis dikarenakan di usung oleh ulama.

Ada juga sebagian masjid yang memperbolehkan kegiatan politik bersifat umum hanya saja pengelokasian tempatnya saja yang berbeda, yang mana kegitannya di lakukan di halaman masjid dan di karenakan adanya hadir oknum politik yang non muslim. Ada juga oknum poitik yang hadir yang sengaja di undang dan tidak sengaja di undang, yang man oknum tersebut ada yang memberikan bantuan dan ada juga yang di iming-imingan bantuan untuk keperluan masjid tapi tidak kunjung sampai. Dalam kegiatan politk di masjid ada

pula sebagian ustadz yang membahas tentang politik yang mana guna untuk pemahaman umat Islam tentang berpolitik yang baik yang di lakukan pada masa Rasulullah SAW

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang didapati selama proses penelitian yang di lakukan di beberapa masjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, menegenai fator-faktor pendukung tentang bagaimana respons dan alasan BKM dalam menyikapi perpolitikan yang dilakukan di masjid-masjid kelurahan sei Agul Kecamatan Medan Barat.

Adapun hasil wawancara yang di perbincangkan oleh peneliti dan Pihak BKM selama proses penelitian sebagai berikut:

a. Masjid Silaturrahim

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: Selama ini pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas politik yang mana gunanya untuk pemahaman umat Islam, dan belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah berpolitik

2. Apakah pernah Masjid Silaturrahmi di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Kalau kegiatan politik tidak ada, akan tetapi pernah di datangi dari beberapa partai dan itu di hadiri secara personal tokoh tidak secara kepartaian, baik itu calon anggota dewan dan calon kepala daerah

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Silaturrahim mendukung atau tidak?

Jawab: Pihak BKM merasa tidak adanya permasalahan atas kehadiran oknum politik dan itu semua kembali kepada masyarakat/jama'ah, dan pihak BKM tidak membatasi dari partai mana saja yang hadir ke masjid, di karenakan takutnya pemikiran masyarakat/jama'ah yang menganggap bahwa masjid ini dari partai ini dan lain-lain, makanya pihak BKM memberikan keterbukaan untuk semua partai. Apabila konteks yang di sampaikan dari partai tersebut bersifat umum pihak BKM hanya memberikan izin di halaman masjid saja dan apabila konteksnya bersifat Islami pihak BKM memperbolehkannya di dalam masjid

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Silaturrahim?

Jawab: Selama ini reaksi masyarakat positif, dan ada juga sebagian yg negatif di karenakan melihat dari tokoh politik dan partai yang hadir

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Silaturrahim dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: Pernah ada aktor politik yang memberikan bantuan seperti Rahmad Syah dan itu di undang juga oleh pihak BKM sekaligus sosialisasi tentang politik. Ada juga yang hadir dari Partai Golkar dan itu di undang juga di karenakan orang setempat dan memberikan bantuan, dan ada juga yang mengiming-ngimingin bantuan tapi tak kunjung sampai juga. Hal yang di beri dari aktor politik semuanya untuk kemakmuran masjid

6. Apakah ada seorang ustadz yang mengisi ceramah mengenai partai politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: Kalau untuk menaikkan oknum terkait ada tapi itu dari kalangan umat Islam saja dan untuk mengisi sebuah ceramahnya itu hanya sekedarnya saja⁴⁶

b. Masjid Jami'

⁴⁶ Parmohonan Nasution, Ketua BKM, Rumah Parmonan, Wawancara Pribadi, 12 Agustus 2018.

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: tidak mengizinkan

2. Apakah pernah Masjid Jami' di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: sampai sekarang ini belum pernah

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Jami' mendukung atau tidak?

Jawab: Pada prinsipnya pihak BKM tidak mendukung, karena berbeda politik pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah berpolitik hanya di lakukan antara umat Islam dan kaum Kafir, kalau di Indonesia partai Islam saja yang berpolitik banyak ragamnya. Jadi pada intinya partai politik tidak pantas dan tidak cocok di Indonesia untuk lakukan di masjid, karena masjid itu milik seluruh umat Islam tidak membedakan politik mana yang di anutnya

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Jami'?

Jawab: Kurang terima, karena takut adanya perpecahan umat Islam dikarenakan politik

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Jami' dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: sampai saat ini belum ada, dan pihak masjid tidak pernah meminta bantuan untuk ke makmuran masjid

6. Apakah ada seorang ustadz yang mengisi ceramah mengenai partai politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: selama ini belum ada, hanya saja dari kalangan ust yang bukan dari golongan partai mengajukan pilihlah yang satu akidah.⁴⁷

c. Masjid Nurul Islam

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: memperbolehkan yang penting bersifat Islami

2. Apakah pernah Masjid Nurul Islam di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Kalau kegiatan politik praktis belum ada, kalau kegiatannya bersifat keagamaan kami mendukung, yang penting mengikuti prosedur dari DMI (dewan Masjid Indonesia)

⁴⁷ Thantawi Nasution, Ketua BKM, Rumah Thantawi, Wawancara Pribadi, 13 Agustus 2018.

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid

Nurul Islam mendukung atau tidak?

Jawab: mendukung apabila prinsipnya ukhuah Islamiyah, dan tidak melambangkan atas satu partai

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika

ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Nurul Islam?

Jawab: reaksi masyarakat ada yang menerima ada yang tidak, karena dari karena itu pihak masjid tidak melambangkan atas satu partai

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Nurul Islam dengan

tujuan memberikan bantuan?

Jawab: belum ada

6. Apakah ada seorang ustadz yang mengisi ceramah mengenai partai

politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: belum ada, hanya saja ada seorang ust dari kalangan partai dan ust tersebut memang sebelum masuk kedunia parpol ust tersebut sudah aktif mengisi pengajian subuh dan malam di masjid, dan tidak ada membawa nama oknum politik.⁴⁸

⁴⁸ Suwanto, ketua BKM, Rumah Suwanto, Wawancara Pribadi, 19 Agustus 2018.

d. Masjid Raudhatul Islam

1. Apakah pernah Masjid Raudhatul Islam di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Di datangi pernah tapi tidak berbaur politik, datang hanya ceramah dan di isi oleh Romo dari Partai Gerindra dalam rangka subuh berjamaah

2. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Raudhatul Islam mendukung atau tidak?

Jawab: Tidak terlalu peduli karena menganggap mereka tidak berpolitik

3. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jamaah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Raudhatul Islam?

Jawab: Masyarakat terima di karenakan hanya mengisi subuh berjamaah bukan berpolitik.

4. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Silaturrahim dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: belum ada, hanya saja di iming-imingin sound sistem tapi tak kunjung datang.⁴⁹

e. Masjid Al-Ikhlas

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: Memperbolehkan adanya kegiatan politik

2. Apakah pernah Masjid Al-Ikhlas di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Pernah di datangi, pihak BKM selalu terbuka saja, karena melihat Rasulullah SAW berpolitik juga di masjid

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Silaturahmi mendukung atau tidak?

Jawab: pihak BKM mendukung dan sebagian tidak, karena yang hadir ke masjid ada sebagian dari kalangan non Muslim yang mana pada kala itu dalam acara buka puasa bersama

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Silaturahmi?

⁴⁹ Muhammad Azhari, Sekretaris BKM, Masjid Raudhatul Islam, Wawancara Pribadi, 12 Agustus 2018.

Jawab: Reaksi masyarakat seperti halnya di kalangan menengah kebawah, mereka setuju-setuju saja asalkan membawa oleh-oleh dan ada juga menganggap sebagian politik itu jelek dan beranggapan politik di masjid itu tidak baik, akan tetapi pihak BKM selalu terbuka saja

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Silaturrahim dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: Pernah dan itu bantuannya untuk masyarakat/jama'ah, bukan untuk kemakmuran masjid.⁵⁰

6. Apakah ada seorang ustadz yang mengisi ceramah mengenai partai politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: Pernah ada seorang ust yang menyampaikan untuk memilih ini akan tetapi namanya tidak di sebutkan dan yang di sampainyakan seorang ust tersebut salah satu yg di usung oleh ulama

f. Masjid Al-Muttaqin

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: Boleh

⁵⁰ Mansur Nasution, Ketua BKM, Masjid Al-Ikhlas, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2018.

2. Apakah pernah Masjid Al-Muttaqin di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Tidak ada

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Al-Muttaqin mendukung atau tidak?

Jawab: Tidak mendukung apabila untuk mencapai tujuan tertentu

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Al-Muttaqin?

Jawab: Tidak setuju

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Al Muttaqin dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: tidak ada, dan pihak masjid tidak pernah meminta

6. Apakah ada seorang ustadz yang mengisi ceramah mengenai partai politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: Pernah ada seorang ust, tetapi ceramahnya menyinggung tentang parpol, akan tetapi pihak BKM tidak beranggapan ustadz tersebut membahas tentang parpol.⁵¹

⁵¹ Imran Nasution, Ketua BKM, Masjid Al-Muttaqin , Wawancara Pribadi, 12 Agustus 2018.

g. Masjid Taqwa Muhammadiyah

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: Memperbolehkan, untuk perkembangan politik di Muhammadiyah

2. Apakah pernah Masjid Taqwa di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Ada di lakukan kegiatan politik, dan kegiatan itu lakukan untuk mendukung parpol tersebut dan pelajaran politik yang gunanya untuk perkembangan politik islam

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Taqwa mendukung atau tidak?

Jawab: Mendukung kegiatannya dan mendukung bagi yang ingin mencalonkan dan itu harus di musyawari terlebih dahulu

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Taqwa?

Jawab: Mendukung dan tidak merasa resah, karena jamaahlah yang memotori oknum tersebut bisa atau tidaknya berpolitik, cuman yang khususnya untuk beribadah

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Taqwa dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: selama ini belum ada menerima bantuan

6. Apakah ada seorang ustadz yang mengisi ceramah mengenai partai politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: Pernah ada, cuman pihak BKM tidak mendukung⁵²

h. Masjid Syarifaturrahman

1. Apakah Pihak BKM memperbolehkan pengkajian yang membahas tentang politik?

Jawab: Memperbolehkan, tapi ada batasan-batasannya di karenakan takut adanya perpecahan

2. Apakah pernah Masjid Syarifaturrahman di datangi oknum politik atau di lakukan kegiatan politik?

Jawab: Pernah

3. Bagaimana BKM menanggapi aktor politik yang hadir ke Masjid Syarifaturrahman mendukung atau tidak?

Jawab: Mendukung, di karena itu adalah suatu hal yang positif dan masyarakat mendukung calon yang di usung memang dari kalangan

⁵² Mhd. Hamdani, Ketua BKM, Masjid Taqwa, Wawancara Pribadi, 13 September 2018.

dekat kepada kepada Allah dan bertaqwa, dan oknum politik yang kita usung ini adalah orang yang di kenal

4. Selama ini bagaimana reaksi masyarakat/jama'ah menurut BKM jika ada tokoh politik yang hadir ke Masjid Syarifaturrahman?

Jawab: Menerima, Bagi jama'ah itu adalah hal yang biasa selama itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak memecah belah masyarakat di lingkungan

5. Apakah pernah ada aktor politik datang ke Masjid Syarifaturrahman dengan tujuan memberikan bantuan?

Jawab: belum ada

6. Apakah ada seorang ust yang mengisi ceramah mengenai partai politik untuk nama oknum terkait?

Jawab: belum ada yang berbicara tentang individu seseorang yang di calonkan belum ada, yang pernah di bicarakan oleh ustadz tersebut adalah politik secara umum. Artinya betapa pentingnya umat Islam ini harus memahami politik dan mengerti maksud dan tujuan dari politik tersebut.⁵³

⁵³ Kholid Daulay, Ketua BKM, Masjid Syarifaturrahman, Wawancara Pribadi, 13 September 2018.

C. Analisis Tentang Respons dan Alasan Dalam Menyikapi Pemanfaatan

Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis

Berdasarkan data-data dan hasil wawancara yang di dapati selama proses penelitian di masjid-masjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala adalah:

1. Perbedaan pendapat antara BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat mengenai perpolitikan yang di lakukan didalam masjid baik itu pengajian dan kegiatan politik yang bersifat umum dan Islami.
2. Ada juga sebagian masjid-masjid yang di perbolehkan pihak BKM untuk melakukan kegiatan politik praktis dengan persyaratan harus yang di usung oleh ulama dan masyarakat sudah mengenal baik itu watak dan perilaku oknum politik yang di usung.
3. Kehadiran parpol di masjid-masjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan tujuan memberikan bantuan untuk kemakmuran masjid, yang mana bantuan yang di iming-imingkan ada yang kunjung datang dan ada juga yang tak sampai-sampai.
4. Pada sebagian kalangan masyarakat/jama'ah masjid Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, ada yang mendukung kehadiran parpol yang

hadir kemasjid-masjid dan ada juga yang tidak memperbolehkan kehadiran parpol tersebut.

5. Adanya kehadiran seorang Ustadz dari kalangan parpol yang mana ini tidak menjadi permasalahan di masjid-masjid di karenakan hanya mengisi sebuah pengajian dan perwiritan dan ada juga sebagian masjid yang belum pernah di datangi seorang ustadz yang aktif di kalangan parpol.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis dalam sejarah peradaban Islam

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Pemafaatan Masjid untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)” dapat di simpulkan sebagai berikut:

Pendayagunaan masjid dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan. Seiring dengan kemunduran dan kebangkitan kembali umat Islam fungsi masjid semakin berbeda dengan adanya pengurangan dan penambahan fungsi. Dalam bidang politik pemanfaatan masjid ada batasan-batasan tertentu. Pada dasarnya kegiatan apapun yang tidak melanggar syariat di perbolehkan di lakukan di masjid, termasuk kegiatan politik. Namun kegiatan politik yang mengindikasi pada propaganda, perpecahan, dan

kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai syariat tidak diperbolehkan di masjid

Dewasa ini pemanfaatan masjid masih di gunakan sebagai tempat musyawarah hanya saja tingkatannya berbeda. Keadaan itu kini telah berubah, sehingga timbullah lembaga-lembaga baru yang mengambil alih sebagai peranan masjid di masa lalu, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi ke agamaan lainnya. Seperti halnya telah ada lembaga tersendiri yang mengurus tentang pernikahan, ke prajuritan ataupun peperangan, dakwah, kesehatan, peradilan dan sebagainya.

. Fungsi dan peran masjid secara luas seperti masa Rasulullah SAW tentunya sulit untuk di wujudkan pada masa kini. Namun, ini tidak berarti bahwa masjid tidak dapat berperan di dalam hal-hal tersebut. Paling tidak perlu upaya daalm mengendalikan fungsi dan peran masjid agar lebih luas lagi di kalangan masyarakat. Jika pada pasca sejarah Islam musyawarah di masjid pada tingkatan negara Madinah, pada era dewasa ini musyawarah di masjid hanya pada tingkatan di bawahnya. Selain itu nuansa Siyasah Maliyah terlihat dari hadirnya Baitul Mal pada masa klasik di area masjid.

Pada pasca sejarah Islam masjid di fungsikan sebagai tempat musyawarah menentukan pemimpin negara, tempat menyusun siasat perang,

sebagai tempat latihan perang, sebagai penahan tawanan perang, sebagai pengadilan, pada dewasa ini fungsi masjid sudah di ganti oleh lembaga- lembaga dengan gedung-gedung khusus sebagai prasarananya. Pendayagunaan masjid dalam bidang politik hanya sebatas kontribusi secara tidak langsung yaitu sebagai titik pijak penggerak umat jika hak konstitusi dan politik umat Islam terusik, serta sebagai wadah pembinaan umat agar tidak terjadi bentrok politik antar agama juga wadah pencetak pemimpin politik Islam masa depan yang memiliki akhlakul karimah, ini terjadi di karenakan perbedaan luas wilayah, sarana yang ada, pemikiran yang tumbuh serta organisasi politik di masing-masing era

2. Bagaimana fenomena pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat

Adapun fenomena yang terjadi di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, begitu banyaknya oknum politik dari berbagai partai yang hadir kemasjid- masjid di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan berbagai agenda kegiatan baik itu mengadakan pengajian, sosialisasi kemasyarakatan menengah keatas dan ke bawah, sosialisasi ke bidang pendidikan, memberikan bantuan keberbagai pihak yang di tuju, dan lain-

lain. Apalagi dewasa ini di masa-masa kampanye begitu banyaknya seruan dari kalangan oknum politik yang menghampiri masjid-masjid dengan suatu tujuan alasan yang baik pastinya bagi masyarakat.

3. Bagaimana respons dan alasan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dalam menyikapi pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis

Berbagai macam respons dan alasan BKM mengenai perpolitikan di masjid, ada pihak BKM yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan, dan berbagai alasan ada yang berfikir untuk menjaga tidak ada perpecahan antara umat, ada juga yang berfikir umat Islam harus terjun ke dunia politik dan lain-lain, begitu juga sebaliknya pendapat masyarakat/jama'ah.

B. Saran

Di Akhir pembahasan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna bagi pihak BKM Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dalam bidang politik praktis di masjid, yaitu:

1. Semestinya politik yang dilakukan di dalam masjid adalah suatu jalan mulia untuk mencerdaskan umat, bukan jalan *money* politik ataupun politisasi agama dalam sistem sekuler. Kepemimpinan adalah bagian dari politik, maka sesuatu yang keliru ketika mengatakan agama tidak boleh dibawa dalam politik karena sejatinya agamalah yang mengatur seluruh aspek kehidupan yang di dalamnya mencakup politik.

Inilah yang harus di pahami kemasyarakat/jama'ah sehingga tidak alergi terhadap politik. Maka seharusnya seluruh elemen masyarakat/jama'ah dapat meneyerukan agar kembali kepada sistem yang benar, penerapan Islam secara menyeluruh dan tidak takut dalam menyampaikan kebenaran karena Allah SWT yang ada di belakang kita. Rasulullah SAW memuji para ulama yang berani menyampaikan kalimatul Haq di hadapan penguasa yang dzalim, dalam haditsnya “jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat adil (kebenaran) di hadapan penguasa yang jahat (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)”. Wallahua'lam bishawab

2. Seharusnya politik praktis merupakan sarana dalam menyampaikan dakwah dan tentunya kita harus masuk kedalam sistemnya jika kita ingin mengubah yang ada. Dan saya beranggapan bahwa politik praktis ini boleh di

berlakukannya apabila salah satu oknum politik tersebut hasil dari ijtihad para ulama dan salah satu contoh: Apabila ada bakal calon oknum politik ini tersebut adalah sepasang umat Islam dan di kalangan lainnya (lawannya) bakal calon politiknya sepasang umat non muslim dan hanya dua ini saja calon legislatif tersebut yang mengajukan dirinya, ini wajib di berlakukannya politik praktis yang di mana di sini kita memperjuangkan bakal calon umat seakidah. Adapun yang saya tidak setuju dengan politik praktis tersebut adanya perpecahan dari kalangan umat Islam yang mana bakal calon dari oknum politik ini dari kalangan umat Islam keseluruhannya dan sebagian umat non muslim dan itu tidak layak untuk di berlakukan karena takut adanya perpecahan di kalangan umat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amri Amrullah, *Masjid dan Politik*, Koran Republika Online edisi 06 Maret 2015, di akses pada tanggal 07 September 2018.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad*, Surakarta: Shahih, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2005.
- Al Qorni, Aidh. *At-Tafsir Al-Muyassar*, Juz 10 Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; PT Rieneka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan, ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, Juz 10 Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- E.Ayub, Mohammad, *Manajemen Masjid : Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Jakarta : Gema Insani, 2007.
- Fahimah Ilyas, Husnl. “Menyoal Peran dan Fungsi Masjid Pemerintahan : Studi Atas Masjid Agung Syuhada Polewali Mandar Makasar”, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 17, 2, 2015: 262.

Gaffar, Afan. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Yogyakarta: PT.

Bina Aksara, 1984.

Husain, Huri Yasin. *Fikih Masjid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

HR, Ridwan. *Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH

UII Press, 2007.

<http://www.dmi.or.id>.

<http://www.lpmpendapa.com>, edisi 20 April 2016, di akses pada, tanggal 12

September 2018.

Ismail, Satori & Abdurrahman, Hafidz. *Pemikiran Politik Dakwah Kontemporer*,

Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015

Ibrahim,, Hasan. *Sajarah dan Kebudayaan Islam 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Kurniawan, Syasul. “Masjid Dalam Lintas Sejarah Umat Islam “, *Jurnal*

Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, 4, 2, 2004: 117.

Madjid, Nurcholish. *Islam Kemoderenan dan ke Indonesiaan*, Bandung:

Mizan, 2008

Nasution, Dahlan. *Politik internasional: Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga,

1991.

Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung : Pustaka Setia. 2008.

Syafe'i, Makmur. Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam ,” *Jurnal*

Usuluddin, 27, 5, 2008: 109

Surbakti,Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keselesaan Al-Quran*,

Juz 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka

Cipta,1991.

Syarfi Harahap, Sofyan. *Manajemen Masjid Suatu Pendekatan Teoritis dan*

Organisatoris, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, Cet ke-5, 2011

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jakarta : Bhuana Ilmu,

2018.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 16 November 1996, anak ke dua dari empat bersaudara, putra dari pasangan suami-istri, H. Fadlan Zuchri Lubis, SE dan Hj. Harisah Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD. Muhammadiyah 11 pada tahun 2008, tingkat Tsanawiyah di Pondok Pesantren Al- Mukhlisin pada tahun 2011, Program Tahfizul Qur'an di Pesantren Abdurrahman bin Auf pada tahun 2013, dan tingkat Aliyah di Pesantren Modern Al Mukhlisin pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, Penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Orientasi Kemahasiswaan, tergabung ke dalam Pergerakan dari berbagai organisasi ekstra maupun non ekstra dari berbagai bidang baik itu keagamaan, kepemimpinan, dan kemanusiaan (sosial).